

ANATOMI GERAKAN SOSIAL DI RIAU: Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat Riau Terhadap Negara 1998 - 2001

Hasanudin

Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)

Universitas Riau (Unri)

Alamat Email: hasanudin@yahoo.com

Abstract

A social movement is a collective opposing way established by plenty of communities which have the same goals and aspirations in terms with a continuity interaction with the state. A social movement is a way considered effective in gaining the goal by mobilizing the supports and the resources, both economic or political resources. The success of a social movement is supported by a leadership factor in that movement and movement organisation by determining effective ways to get the collective goals. A social movement in a society is a manifestation from unsatisfaction toward the central government and natural resources exploitation or the economy of Riau people without taking notice of the existention and the continuity of Riau local people.

Key words : Social Movement, Politic, Riau People and Opposition

Intisari

Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok komunitas yang memiliki kesamaan tujuan dan aspirasi dalam interaksi yang memiliki kesamaan tujuan dan aspirasi dalam interaksi yang kontinu dengan negara. Gerakan sosial adalah sebuah metode yang efektif dalam tujuannya untuk menggerakkan tujuan dan sumber daya, baik ekonomi atau politik. kesuksesan gerakan sosial didukung oleh faktor

kepemimpinan dalam gerakan dan pengorganisasian gerakan yang dilakukan oleh cara efektif untuk mencapai tujuan. sebuah gerakan sosial dalam masyarakat merupakan sebuah manifestasi dari ketidakpuasan kepada pemerintah pusat dan eksploitasi sumberdaya alam atau ekonomi terhadap masyarakat Riau tanpa melibatkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat Riau.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Oposisi, Politik, dan Masyarakat Riau.

Pendahuluan

Membicarakan gerakan sosial dalam konteks perubahan sosio-politik bangsa dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat telah merupakan sesuatu yang menarik, khususnya dikaitkan dengan tuntutan demokratisasi politik. Fenomena gerakan sosial yang mengalami transformasi dengan begitu cepat setidaknya didasarkan pada tiga alasan; *pertama*, dalam perjalanan sejarah perubahan sosial dan politik gerakan sosial merupakan variabel yang mempengaruhi (*independen variable*) bagi upaya: meruntuhkan rezim otoritarian, menguatkan transisi demokrasi: dan atau mendorong konsolidasi demokrasi.¹ Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi kearah konsolidasi demokrasi dengan berbagai distorsi didalamnya, pemahaman yang utuh mengenai gerakan sosial sangat dibutuhkan terutama mengenai proses muncul, menguat dan melemahnya.

Kedua, pasca gerakan sosial di Riau 1998 - 2001 tidak ada lagi kekuatan sosial yang mampu mengontrol "oligarki" elite politik dan birokrasi yang mendominasi mekanisme politik-pemerintahan di daerah ini. Andainya gerakan sosial di Riau 1999-2001 konsisten dengan agenda perubahan yang dicanangkan pada awalnya, maka pada hari ini kita bisa berharap ada kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan oligarki tersebut. *Ketiga* dengan mempelajari gerakan sosial yang pernah berlangsung diharapkan bagi aktor-aktor yang akan menyelenggarakan gerakan sosial dimasa depan, dapat mempertimbangkan permasalahan yang terdapat dalam gerakan.

1 Studi Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial*, (terj.) Erlangga, Jakarta, 1991 mengenai pengalaman Perancis, Rusia dan Cina; dan Guillermo O'Donnell et-al., *Transisi Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (terj), Jakarta: LP3ES 1993 dan Studi John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj), Pustaka Pelajar, 2002 menunjukkan hal itu.

Proses Pengorganisasian Gerakan

Gerakan sosial (*Social movement*)² yang dimaksud disini yaitu perlawanan kolektif yg dilakukan sejumlah masyarakat Riau yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan negara. Sejak merebaknya reformasi politik nasional, berlangsung serangkaian perlawanan yang memperjuangkan hak masyarakat dan daerah Riau yang selama ini dipandang dizalimi negara atau pemerintah pusat. Sepanjang periode 1998 sampai 2001 perlawanan mengalami penguatan pada paruh awal, baik dalam antusiasme partisipan gerakan, penggunaan cara gerakan maupun isu yang dilontarkan, akan tetapi mengalami pelemahan di paruh berikutnya. Masalah yang perlu diperbincangkan yaitu kondisi apa saja yang terbentuk sehingga terjadi dinamika, perlawanan masyarakat Riau sedemikian rupa.

Teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilisation theory*)³ menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan cara atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan sebagai salah satu cara yang tersedia di dalam masyarakat. Dengan penekanan pada cara gerakan dan proses yang dilalui untuk sampai pada penggunaan cara itu, kepentingan dalam ketidak puasan yang menyulut aksi kolektif itu menyusut. Pertanyaan penelitian tidak dititik beratkan pada mengapa orang tidak puas karena ketidak puasan sebenarnya bukan merupakan alasan yang cukup untuk melakukan gerakan, ketidak puasan dapat ditemukan dimana saja termasuk pada orang yang tidak ikut di dalam gerakan.

Ketidak puasan atau kekecewaan merupakan kondisi yang mengawali (*antecedent variable*) bagi munculnya variabel lain yaitu upaya memobilisasi sumber daya gerakan. Fokus pertanyaan penelitian berubah menjadi bagaimana kapasitas organisasi gerakan memobilisasi sumber daya sehingga orang-orang yang merasa tidak puas melakukan gerakan. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditelusuri pada: (a) di tingkat individual, kerugian dan manfaat

2 "Tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, penguasaan dan lawan" - Tarrow, 1994 (*Power in Movement*) hal 4. Tarrow menekankan bahwa pada dasarnya gerakan (a) menyusun aksi disruptive melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain dan aturan-aturan budaya tertentu, (b) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (c) berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif, dan (d) terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial)

3 Tokoh utama teori mobilisasi sumber daya diantaranya, Charles Tilly (1978) dan Sidney Tarrow (1994)

yang diperoleh dalam berpartisipasi; (b) di tingkat masyarakat, pada ketersediaan sumber daya terutama pada organisasi-organisasi dari jaringan-jaringan sosial, dan (c) di tingkat politik pada keberadaan atau perubahan peluang-peluang politis.⁴ Sedangkan dinamika gerakan sosial sangat ditentukan oleh keberadaan pemimpin dan organisasi gerakan sosial yang merumuskan tujuan dan menentukan cara-cara gerakan. Jadi dalam perspektif teori mobilisasi sumber daya, dinamika gerakan sosial dipengaruhi oleh kemampuan organisasi gerakan sosial mempengaruhi individu untuk berpartisipasi, memobilisasi sumber daya dalam masyarakat dan memanfaatkan peluang-peluang politis.

Pengantar perbincangan ini disusun dari penelitian yang masih berjalan dengan merekonstruksi data fakta gerakan yang ditelusuri dari dokumentasi pemberitaan media massa, dokumen-dokumen dan data-data agregat yang kemudian sebagian dikonfirmasi kepada aktor-aktor gerakan. Penjelasan-penjelasan di balik fakta gerakan diperoleh dengan melakukan wawancara-wawancara mendalam dengan partisipan, pendukung dan bukan pendukung gerakan serta orang-orang yang dipandang mengetahui gerakan ini. Data-data itulah yang analisis dengan memilah dan menyisihkan serta memberikan makna-pemaknaan.

Aksi Protes: Tuntutan Keadilan Ekonomi dan Pemberantasan Korupsi

Ledakan gerakan sosial di Riau 1998 – 2001 dimulai (Mei 1998) ketika mahasiswa Riau merespon perubahan-perubahan politik di tingkat nasional. Serangkaian aksi mimbar bebas, *long march*, mendatangi gedung DPRD dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan tuntutan dan protes masih seputar reformasi ekonominya dan politik nasional.⁵ Forum mahasiswa untuk reformasi (Formasi) tercatat sebagai organisasi gerakan yang pertama di Riau dan mulai mengangkat isu lokal terutama pemerintah yang bersih (bebas KKN).⁶ Pola menuntut pejabat daerah yang dinilai melakukan KKN mengundurkan diri dari jabatannya meluas ke daerah-daerah tingkat II Pejabat di Kabupaten

4 Klandermans, *Protes*, (terj) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 372 – 373.

5 Peristiwa-peristiwa tersebut diliput intensif media massa lokal khususnya Riau Pos.

6 Formasi aktif melakukan demonstrasi mengusung isu pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagai penjabaran isu ini, Formasi menuntut pengunduran diri Gubernur Riau Suroto, Walikota Pekanbaru Usman Efendi Apan dan Kadit Sospol Riau Paris Ginting yang dinilai bergelimang dengan KKN.

Kepulauan Riau, Kabupaten Inderagiri Hulu, Kabupaten Inderagiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis menjadi sasarannya. Biasanya, mahasiswa dari daerah-daerah tersebut beramai-ramai pulang kampung dan disana melakukan serangkaian demonstrasi.

Sebatas ini, demokratisasi dimaknai sebagai pemberantasan KKN. Disamping aksi-aksi demonstrasi ini, diskusi-diskusi juga dilakukan mahasiswa dimotori oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (Forkom SMPT) se-Riau. Dari evaluasi perjalanan Orde Baru mereka sampai pada kesimpulan bahwa Riau tidak boleh lagi terjebak dalam sentralisme kekuasaan Jakarta yang menyengsarakan daerah. Harus format, Riau menjadi entitas politik yang otonom dan demokratis. Dikalangan akademisi bukan mahasiswa terbentuk Lembaga Pemantau Reformasi Riau (LPRR)⁷ yang menggagas perlunya reformasi disegala bidang berlangsung di Riau.

Tuntutan pemerintah yang bersih dan keinginan memformat Riau menjadi negeri yang otonom dan demokratis, kemudian beralih kepada isu bagi hasil minyak yang awali oleh kedatangan orang-orang yang mengatas namakan FKB KAPPI Eksponen 66 ke kantor CPI Rumbai yang diliput media massa. Segera saja isu bagi hasil minyak menjadi perbincangan serius dan menjadi tuntutan gerakan. Tuntutan tersebut kemudian mendapat dukungan DPRD Riau yang menurut ketuanya Drs. Darwis Ridha, PT. CPI belum sumbangan apa-apa buat Riau. Majelis Kerapatan adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA-LKMR) mengeluarkan pernyataan menuntut penyempurnaan dan direalisasikan UU No. 32 / 1956 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Disamping itu dituntut supaya daerah penghasil minyak dan gas bumi mendapat bagian dengan sistem bagi hasil yang jelas dan transparan.⁸

Sekitar 200 orang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau melakukan demonstrasi di kantor CPI Rumbai Pekanbaru (11/6/1998) menuntut 30% keuntungan PT CPI untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau. Mereka kemudian berdialog dengan pimpinan PT. CPI di Pekanbaru yang berjanji akan menyampaikan tuntutan ke pimpinan PT. CPI di Jakarta. Dalam pertemuan itu mahasiswa menolak mencicipi hidangan yang disediakan Caltex. Menanggapi demonstrasi tersebut, Gubernur Riau (Suripto)

7 LPRR mengkoordinir berbagai organisasi seperti apa yang dikemukakan Klandermans (2005) bahwa organisasi gerakan social sebagai medan multi organisasional.

8 MKA-LMAR, dipimpin H. Wan Galib seorang yang sangat berpengaruh di Pekanbaru. Lihat berita Riau Pos, 9 Juni 1998.

menyarankan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat.

Menyikapi perkembangan tuntutan bagi hasil minyak tersebut, Lembaga Pemantau Reformasi Riau (LPRR) mengeluarkan pernyataan menghimbau kepada seluruh kekuatan reformasi Riau menduduki PT CPI (Caltex) pada tanggal 25 Juni 1998, menuntut 70% bagi keuntungan Caltex dan pemerintah (Pertamina). Berbagai tanggapan dikemukakan terhadap rencana tersebut. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyesalkan rencana itu. Alfitra Salam (seorang peneliti LIPI berasal dari Riau) menyatakan tuntutan harus realis. Zamharir (anggota DPR RI dari Riau) mengharapkan aksi menduduki Caltex tidak dilakukan secara anarkis. Muchtar Ahmad (Rektor Unri) menyatakan penduduk tidak perlu. Caltex menyanggupi menyediakan tiket pesawat untuk 10 orang tokoh masyarakat yang bermaksud menyampaikan tuntutan ke Jakarta. Rapat Muspida Riau mengeluarkan pernyataan ABRI akan menindak tegas pendudukan proyek vital di Riau (Caltex). Mendagri Srwan Hamid menyatakan hal yang sama dengan Muspida.

Mendapat reaksi berbagai pihak itu, rencana pendudukan tidak jadi dilaksanakan. Rombongan sekitar 60 orang yang mengatasnamakan Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRR) yang terdiri dari unsur tokoh/pemuka masyarakat Riau, Forum Cendekiawan Muda Riau (FCMR), Ekspone 66 FKB KAPPI Riau, Komite Aksi Anti KKN Riau Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPEMARI) Jakarta LPRR dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau) hanya datang membentangkan spanduk bertuliskan "50 Tahun Menanti, Kini menuntut Hak atas Minyak Bumi Negeri Ini", dan membacakan pernyataan: menggugat pemerintah Indonesia yang tidak memberi bagian hasil minyak; menggugat PT CPI dan Pertamina yang ikut mengabaikan masyarakat Riau; menuntut penggantian manajemen PT.CPI dan Pertamina; menuntut supaya PT CPI dan Pertamina mereklamasi bekas daerah eksploitasi; PT CPI dan Caltex harus membayar retribusi galian C yang digunakannya ke Pemerintah Daerah; Karyawan Pertamina dan Caltex harus lebih peduli pada kepentingan masyarakat Riau.

September 1998 Politisasi isu kemudian dialihkan ke Jakarta. Utusan GKRRM menemui sejumlah pejabat negara yang dianggap berwewenang seperti Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana, Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung, Menteri Dalam Negeri Sarwan Hamid dan Presiden Habibie menuntut 10% hasil penjualan minyak bumi dari Riau diserahkan kepada masyarakat Riau melalui APBD. Semua pejabat negara yang ditemui menyatakan menyambut baik tuntutan itu, bahkan Habibie menjanjikan akan memproses

tuntutan itu selama dua bulan. Setelah lewat dua bulan kejelasan tuntutan belum ada; Habibie minta maaf dan melalui Gubernur Riau⁹ menjanjikan akan mengakomodasi tuntutan masyarakat Riau dalam undang-undang yang sedang di godok pemerintah.

Ditengah kecemasan menunggu realisasi janji Habibie tersebut, Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) dikejutkan pernyataan Deputy Ketua Bappenas Muhammad Abduh bahwa Riau hanya membutuhkan Rp. 600 milyar rupiah. Padahal dengan tuntutan 10% itu Riau diprediksi akan mendapat minimal 2,61 triliun rupiah dari bagi hasil minyak bumi, dan bila dijumlahkan dengan bagi hasil yang lain diperkirakan Riau akan memperoleh sekitar 5,81 Trilyun rupiah. Pernyataan Deputy Ketua Bappenas itu mendapat reaksi keras GKRMR dengan menyampaikan protes langsung kepada Ketua Bappenas Budiyo.

Sementara itu di Dumai¹⁰ sekitar 120 orang mahasiswa dari Pekanbaru yang menamakan diri Persatuan Reformasi Minyak Riau Semesta (PERMESTA) menduduki pelabuhan Caltex, aset vital yang dimiliki caltex. Pendudukan ini hanya berlangsung beberapa saat karena dihalau aparat keamanan. Meskipun demikian pendudukan yang dilakukan pada 12 Desember 1998 mendapat simpati dari masyarakat Dumai.

Pada 17 Desember 1999 Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (Forkom-SMPT) se Riau mengadakan Musyawarah Besar Masyarakat Riau yang ternyata hanya dihadiri oleh beberapa puluh orang. Acara yang dibuka oleh ketua DPRD Riau menegaskan kembali bahwa bagi hasil minyak sebesar 10% merupakan hak masyarakat Riau sepenuhnya. Masyarakat harus berjuang keras menuntut direalisasikan bagi hasil itu.

Sebagai tindak lanjut Musyawarah Besar Masyarakat Riau, pada tanggal 11 Januari 1999 mahasiswa di koordinasi Forkom SMPT se-Riau melakukan aksi menempel pamflet, membagi-bagikan brosur, memasang spanduk dan menempel stiker pada kendaraan bermotor yang berisi tuntutan bagi hasil minyak.

Pertemuan GKRMR 27/1-1999 memutuskan Tabrani Rab ditugaskan melobi Proninsi Kalimantan Timur, Irian Jaya dan Aceh dibawah koordinasi GKRMR menjajagi kemungkinan melakukan aksi bersama melawan pemerintah pusat. Pada saat yang sama Ribut Susanto dari Riau Mandiri berencana bertemu LSM dari tiga propinsi tersebut

⁹ Gubernur Riau yang baru saja terpilih adalah purnawirawan jenderal Angkatan Darat Putra Riau

¹⁰ Dumai terletak lebih kurang 180 km dari Pekanbaru

untuk menyamakan visi dan memperoleh kesepakatan bersama yang akan disampaikan dalam hearing dengan DPR. Menurutnya, hasil hearing ini akan dijadikan dasar untuk menentukan sikap apakah Riau perlu "Menjahit bendera sendiri".

Bersamaan dengan perkembangan ide-ide mengenai bagaimana menata Indonesia kedepan, ditengah masyarakat Riau khususnya di Pekanbaru pembicaraan mengenai sistem pemerintahan yang terbaik buat Riau juga bahan pembicaraan yang diminati. Pilihan-pilihan seperti otonomi luas, negara federal, Riau bergabung dengan negara lain atau Negara Riau Merdeka. Juga berkembang pandangan supaya di Riau segera diadakan referendum untuk mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat Riau. Isu Negara Riau Merdeka banyak diperbincangkan dikalangan Budayawan Melayu Riau.¹¹

Serangkaian langkah politisasi isu melalui mengeluarkan pernyataan pers, demonstrasi, mendatangi pejabat pemerintah di Jakarta dan melakukan Lobi dengan propinsi-propinsi seide, dirasakan tidak mendapatkan hasil memuaskan bahkan semakin menumpukan kekecewaan. Perbincangan tentang Riau Merdeka semakin diminati bahkan kemudian menjadi pilihan isu yang harus diangkat kepermukaan ketika pada 7 Maret 1999 di Kantor Tabloit Kampus Bahana Mahasiswa, Fauzi Kadir¹² dan Tabrani Rab sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi mengemban amanah mensejahterakan bangsa. Pemerintah pusat terhadap Riau dimata Fauzi Kadir sudah berlaku brutal, beringas kalau tidak berlebihan disebut kolonialis. Menurutnya, "Kita proklamirkan saja kemerdekaan" karena membiarkan kedzaliman itu hukumnya berdosa. Pernyataan yang diamini oleh Tabrani Rab, segera saja mendapat dukungan dari berbagai kalangan seperti Rektor Unri, Keluarga Besar Melayu Riau, pengusaha swasta Riau bahkan ada pernyataan bahwa selain birokrat menyetujui Riau Merdeka. Liputan media juga semakin meluas.¹³

Lima hari berselang, sepanduk-sepanduk mendukung Riau Merdeka mulai terpampang di berbagai lokasi strategi di Kota Pekanbaru. Tabrani Rab mensinyalkan akan memproklamirkan kemerdekaan

11 Salah seorang budayawan yang melontarkan ide ini yaitu, Al-Azhar. Dia pada saat itu sedang mengikuti program Doktor di Belanda. Lihat Utusan, 17 Januari 1999 dan Bahana Mahasiswa Februari - Maret 1999.

12 Fauzi Kadir, SH.MS adalah seorang aktivis yang pada saat itu baru saja mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPW PAN Riau karena merasa tidak cocok dengan kebijakan DPP PAN. Tabrani Rab juga mengundurkan diri dari kepengurusan DPW PAN Riau.

13 Disamping diliput media nasional, juga diliput *Far Eastern Economic Review* 25/4-99

Riau pada tanggal 15 Maret dan sementara ini sedang menyiapkan kelengkapan-kelengkapannya. Menanggapi rencana pendeklarasian kemerdekaan Riau pada tanggal 15 maret ini, selain tanggapan yang mendukung, menguat juga tanggapan menentang. Partai Musyawarah Keluarga Besar Gotong Royong (MKGR) menyatakan menolak Riau Merdeka. Gubernur Riau menganggap hanya sebagai ungkapan kekesalan. Dan tanggapan lebih keras datang dari Menko Polkam Faisal Tanjung yang mengancam " kalau merdeka juga akan dilibas"¹⁴. Tabrani juga sempat diminati keterangan oleh Komando Resor Militer (Korem) Wirabima. Komandan Korem Kolonel Infanteri M Gadilah¹⁵ berpesan, jika ide Riau Merdeka terus dilanjutkan dia akan di tangkap.

Tanggapan dari petinggi militer tersebut terutama tekanan dari Korem ternyata sangat mempengaruhi langkah Tabrani Rab yang kemudian tidak jadi mendeklarasikan Riau Merdeka pada 15 Maret sebagaimana direncanakan dan menggantinya dengan pembacaan teks Deklarasi Daulat Riau. Peristiwa ini hanya dihadiri oleh sekitar 20 orang mahasiswa, tanpa kehadiran tokoh-tokoh masyarakat termasuk Fauzi Kadir sbg penggagas awalnya. Perubahan rencana tersebut menurut Tabrani dimaksudkan: pertama untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu; kedua, deklarasi kemerdekaan tidak perlu karena yang utama adalah kesejahteraan rakyat Riau dan itu bisa diperoleh melalui bergabung dengan Amerika Serikat yang lebih layak bisa memberi kesejahteraan.¹⁶

Terlepas dari kontroversi semantik yang dilontarkan Tabrani, yang jelas di Riau wacana daulat Riau maupun Riau Merdeka makin menguat. Perbincangan mengenai apa langkah selanjutnya selalu hadir dalam banyak perbincangan. Kita jangan surut, sekali telah dideklarasikan, kita harus terus maju. Inilah momentum baru bagi Raiu. Saatnya setelah kedaulatan rakyat Riau dicetuskan, kita menggalang kekuatan untuk mempertahankannya. Kita tentu ingin menjadi sapi perahan bagi pusat.¹⁷

Langkah lain yang diambil Tabrani Rab adalah mengajukan gugatan perdata kepada Presiden Habibie, Menteri terkait, BUMN dan perusahaan swasta terkait sebagai tergugat di Pengadilan Negeri

14 Pernyataan itu disampaikan di Pekanbaru ketika mendampingi Ketua DPA Baramuli mengunjungi Pemda Riau.

15 M. Gadilah adalah putera Riau yang dekat dengan Tabrani Rab dan Fauzi Kadir.

16 Pada kesempatan lain Tabrani menyebutkan keinginan bergabung dengan Amerika bukan final hanya sasaran antara sebelum merdeka.

17 Pernyataan ketua Ikatan keluarga Siak dan Sekitarnya. Hal senada disampaikan Drs. Razali Yahya, seorang pemuka masyarakat Riau (Riau Pos 17 Maret 1999).

Pekanbaru. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui putusan selanya menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Tabrani. Gagal di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tabrani bertekad atas nama masyarakat membawa persoalan ini ke forum internasional.

Dalam wacana publik kemudian terjadi polarisasi antara yang setuju otonomi luas, Indonesia sebagai negara federal dan Riau merdeka. Masing-masing pihak berusaha menyakinkan mengenai keunggulan pilihan. Gubernur Riau yang tentu saja memihak otonomi luas berusaha meyakinkan bahwa tuntutan masyarakat Riau untuk mendapat 10% bagi hasil minyak segera dipenuhi oleh pusat. Upaya itu dilakukan gubernut karena makin menguatnya isu Riau Merdeka. Pada tanggal 13 April 1999, berlangsung demonatrasi oleh 100 lebih mahasiswa dari forum reformasi mahasiswa IAIN Sutan Syarif Qasim (Formis) dengan menduduki Kantor Gubernur Riau sambil meneriakkan yel-yel Riau Merdeka. Pada peristiwa ini mahasiswa menyandra mobil Caltex yang diparkir di Kantor Gubernur.

Melihat eskalasi kegiatan demonstrasi dan dukungan pada gerakan Riau Merdeka, maka pada tanggal 21 April 1999, Gubernur Riau H. Saleh Djasit, SH atas nama tokoh masyarakat Riau bersama-sama dengan sejumlah tokoh masyarakat Riau menemui Menteri Keuangan Bambang Sudibiyono di Jakarta (sebelumnya menemui Mendagri Syaran Hamid). Pertemuan yang berlangsung 2,5 jam itu menghasilkan janji Menkeu bahwa tuntutan masyarakat Riau akan dipenuhi dan mungkin sampai 25 %. Realitas yang menarik adalah sehari sebelumnya berlangsung demonstrasi besar-besaran di Pekanbaru. Sekitar 3000 mahasiswa dari berbagai kelompok reformasi di Riau mendatangi kantor Caltex di Humbai dengan memberikan maklumat yang berisi: penghentian operasional Caltex penghentian sampai terpenuhi tuntutan masyarakat Riau; batas waktu tanggal 26 April 1999. Maklumat tersebut harus *difacsimile* pada saat itu juga kepada Presiden Habibie, Mentamben, Menkeu Pertamina, Pansus DPR RI dan pemilik modal Caltex di Amerika, Kesepakatan mengenai teknis tidak tercapai, kemudian massa mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan dan mereka merusak serta membakar 28 buah kendaraan. Pada tanggal 23 April 1999 pemerintah dan DPR RI menyepakati RUU Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah menjadi UU. Maka resminya Riau akan mendapat 15% dari hasil minyak, melebihi presentase tuntutan masyarakat.

Gerakan Riau Merdeka: sebagai

Dipihak lain, dikalangan pelaku gerakan perlawanan yang menghendaki Riau Merdeka, pertanyaan seberapa besar dukungan terhadap mereka harus segera dijawab karena: *Pertama*, mereka sudah tidak dapat lagi mempercayai pemerintah pusat karena dianggap tidak serius membenahi hubungan yang tidak adil dengan Riau termasuk amanat UU; *kedua*, ada indikasi kuat UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sudah disahkan tidak akan dipenuhi karena : (1) Negara hampir bangkrut dililit utang; (2), korupsi ditubuh Pertamina sehingga Riau akan dibuli terus mengenai total penerimaan dari sektor minyak. Menurut Menkeu sumbangan Caltex yang disetor Pertamina hanya Rp. 4,6 Trilyun di tahun 1998, sedangkan pemberitahuan dari Caltex, perusahaan ini telah menyetor kepada Pertamina sebesar Rp. 17 Trilyun.; (3) Pemerintah pada saat itu sedang mempersiapkan UU migas yang kemungkinn akan tumpang tindih dengan UU diatas, sehingga dianggap pemerintah tidak serius. Langkah lanjutan harus segera diambil. Maka dipersiapkan acara Kongres Rakyat Riau II.

Kongres Rakyat Riau II diadakan pada tanggal 29-31 Januari 2000.¹⁸ konggres ini dianggap merupakan kelanjutan dari Deklarasi Raiu Berdaulat yang dibacakan Tabrani 15 Maret 1999 ¹⁹ penyelenggaraan konggres ini didorong oleh keinginan menjawab keraguan yang berkembang dalam masyarakat, sebenarnya pilihan politik apa yang dikehendaki masyarakat Riau dalam berhadapan dengan NKRI. Otonomikah ? federalkah ?, atau merdeka ? Kongres Rakyat Riau II pada akhirny mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Dari 643 peserta pada saat pemungutan suara, yang memilih sistem federal 146 suara; dan yang memilih otonomi 199 suara. Pada forum ini juga dibentuk Badan Pekerja Kongres Rakyat Riau II yang ditugaskan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan keputusan konggres.

Pasca Kongres Rakyat Riau II sepanjang tahun 2000 – 2001 jsutru menjadi anti klimaks dari gerakan perlawanan di Riau dalam memperjuangkan tuntutan bagi hasil minyak, maupun tuntutan memisahkan diri dari NKRI. Ada beberapa demonstrasi kecil hanya untuk mengingatkan supaya pemerintah pusat tidak mengingkari

¹⁸ Konggres rakyat Riau II oleh panitia dilaporkan mewakili seluruh daerah Riau. Menurut aktivis gerakan yang aktif mengikuti acara ini sebenarnya konggres ini dominan diikuti oleh mahasiswa di Pekanbaru yang mengatasnamakan kampungnya masing-masing.

¹⁹ Ada pandangan lain bahwa sebenarnya konggres ini snejata dipersiapkan untuk mendelegitimasi gagasan Riau Merdeka.

janjinya merealisasi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Gerakan sosial kemudian terjebak dalam formalisasi, negaralisasi dan kooptasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gerakan dan negara.²⁰

Gambaran diatas memperlihatkan: *Pertama*, kesulitan gerakan untuk secara konsisten bertahan pada rumusan tujuan yang merupakan idealisasi kepentingan seluruh masyarakat Riau. Lompatan isu Riau sebagai entitas politik yang otonom dan demokratis kepada isu bagi hasil minyak menunjukkan hal itu. *Kedua*, sangat sulit bagi organisasi gerakan sosial di Riau memobilisasi sumber daya gerakan (kecuali dukungan media) terutama pada momentum yang beresiko seperti demonstrasi atau pendudukan. Ketiga, organisasi gerakan dijadikan sebagai kontestasi antar individu maupun antar kelompok yang pada gilirannya melemahkan gerakan. Keempat, gerakan sosial di Riau tidak berusaha untuk membuat jarak dengan "Negara local" sehingga selalu terbuka kesempatan terjadi negaralisasi dan kooptasi gerakan secara halus.

Realitas berbagai kesulitan yang dihadapi gerakan tersebut menunjukkan adanya kondisi yang tidak mampu diatasi oleh gerakan ini baik dalam meraih dukungan masyarakat maupun dalam melembgakan gerakan. Penyebabnya antara lain: *Pertama*, tingkat ketidakpuasan masyarakat Riau. Masyarakat Riau, meskipun disebutkan sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan, tetapi kemiskinan itu tidak dihubungkan dengan bagi hasil minyak yang timpang atau karena Riau berada NKRI. Pertanyaan-pertanyaan sederhana apakah setelah tuntutan bagi hasil minyak tercapai, kita semua akan dapat bagian? atau apakah setelah merdeka kita akan jadi kaya? selalu saja dilontarkan ketika dimintai tanggapan tentang gerakan ini. Pelaku gerakan ini tidak berusaha serius untuk memperbesar dan mengolah apa yang disebut Gurr kondisi deprivasif relatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Charles Tilly bahwa kondisi deprivasi relatif yang dialami masyarakat tidak akan mendorongnya untuk terlibat dalam aksi kolektif kalau dia tidak terlibat dalam organisasi yang akan melakukan aksi kolektif. Pada gerakan perlawanan ini, jangankan mengajaknya untuk masuk kedalam organisasi, membangun gerakan kedalam tahap pengorganisasian saja sulit.

Kedua, menurut Eric Hoffer sebuah gerakan massa yang berhasil

²⁰ Hasil Kongres ini didapatkan pengakuan dari lembaga formal. Kasus perebutan Blok CPP merupakan conoth menarik keterjebakan gerakan dalam negaralisasi. Masuknya Tabrani dalam DPOD dan masuknya tokoh-tokoh gerakan dalam keanggotaan Dewan Pakar Daerah contoh menarik kooptasi yang dilakukan Negara.

dikendalikan oleh orang-orang dengan kategori (1) the men of word (ideolog) yaitu orang yang terampil berbicara dan menulis, bertugas menyiapkan landasan untuk gerakan, (2) the fanaties yaitu orang mempunyai tabiat dan bakat merencanakan pelaksanaan gerakan dan (3) the practical men of action (pengatur demonstran) yaitu orang yang mampu terlibat langsung mengatur gerakan lapangan yang terjadi dalam gerakan di Riau adalah tidak ada yang tampil penuh sebagai the men of word. Orang-orang yang tergabung dalam LPRR atau Lembaga Sosial Budaya Riau (Tabrani Rab) tidak secara langsung memberikan konsep dan arah gerakan kepada the fanaties tetapi dihubungkan oleh surat kabar. Apa yang digagas oleh ideolog disamping ke koran Riau Pos, kemudian yang dibawah menafsir dan mengatur sendiri. Disamping itu persoalan kepemimpinan adakah titik lemah pada gerakan ini. Tidak pernah jelas apakah Tabrani Rab atau yang lain menjadi pemimpin. Masing-masing kekuatan gerakan perlawanan ini cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Ketiga, identitas kelompok. Persoalan lain gerakan perlawanan ini adalah membangun identitas kelompok yang bisa diterima bersama. Identitas sebagai orang Riau tidak pernah terbangun di Riau. Masyarakat Riau terutama di Pekanbaru sangat beragam dengan komposisi yang seimbang,²¹ ketika dikatakan gerakan orang Riau adalah gerakan orang melayu, pasti tidak akan mendapat dukungan dari kelompok lain lain. Ketika tuntutan bagi hasil minyak bergulir, pertanyaan kelompok mana yang akan memperoleh keuntungan tidak terelakkan ? Begitu juga pada isu Riau Merdeka. Kalau Riau merdeka bagaimana hubungan komunitas yang berasal dari luar Riau dengan daerah asalnya. Realitas ini menyulitkan pelaku gerakan menggunakan simbol-simbol budaya yang hidup pada masing-masing suku untuk menarik dukungan. Tampaknya identitas ke Indonesiaan masih lebih kuat dibanding identitas sebagai orang Riau.²²

Keempat. Kohesi kelompok. Kohesi kelompok sangat bermakna

21 Tidak ada catatan resmi mengenai berapa jumlah penduduk berdasarkan suku di Riau. Diperkirakan Pekanbaru saja terdapat 25% orang Melayu, 25% orang Jawa, 25% orang Minang dan 25 orang dari suku lain. Bahasan menarik mengenai identitas kelompok dalam gerakan sosial lihat, Francessa Polleta and Jasper. "Collective Identity and Social movememnts", *Journal Annual Riview of Sociologi*, Vol. 27/2001 p. 283-300. lihat juga, Bert Klandermans: "How Group Identification Help to Overcome the Dilemma of Collective Action", *Journal American Behavioral Scientist*, Vol. 45 January 2002 p. 887-894.

22 Mohtar Mas'ood, Ibid. tokoh-tokoh gerakan ini tidak pernah tegas menyebut sebenarnya siapa yang dikatakan putra Riau. Ad akalanya dikatakan semua warga Riau terlepas dari asal suku bangsa dan daerah adalah orang Riau. Tetapi pada saat memperebutkan jabatan-jabatan strategis, klasifikasi putra daerah menjadi tegas antara orang Melayu sebagai putra Riau dan suku

dalam upaya penyatuan gerakan dan memberi tekanan-tekanan pada lawan. Sedikit saja kerenggangan dalam kelompok pelaku gerakan akan dimanfaatkan oleh lawan untuk memecah belah. Menurut Ted R. Gurr, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok terjamin kalau ada jaringan komunikasi dan interaksi yang padat. Kohesi itu merosot kalau kelompok itu terpecah dalam beberapa gerakan dan organisasi politik. Pengorganisasian kepentingan sosial, politik dan ekonomi yang efektif dan dalam satu wadah menjamin kekokohan kohesi kelompok tersebut.²³ Daya ikat kelompok, mestinya tebrangun melalui jaringan-jaringan yang dibangun. Persoalannya jaringan kekuatan-kekuatan gerakan lebih banyak mengandalkan hubungan tidak langsung melalui pemberitaan-pemberitaan media massa dan tampaknya solidaritas itu tidak terjadi.

Kelima, kontrol represif. Pada saat tuntutan ini digulirkan, negara berada dalam posisi yang lemah. Apapun tuntutan dari masyarakat Riau dijanjikan akan diakomodasikan oleh negara. Kontrol represif hanya dilakukan ketika mengancam posisi negara. Gerakan ini tidak berani mengambil resiko berhadapan dengan kontrol represif dari negara sehingga yang terjadi ada berkurangnya dukungan terhadap gerakan. Dalam kasus rencana deklarasi Riau Merdeka yang mendapat Ancaman Menko Polkam Faisal Tanjung bahwa "akan dilibas" kalau mendeklarasikan kemerdekaan, gerakan ini tidak berani mengambil resiko dan mengubahnya menjadi deklarasi Riau Berdaulat. Akibatnya berbagai tuduhan dilontarkan yang justru melemahkan gerakan.

Keenam, ideologi alternatif. Tidak muncul ideologi alternatif yang memungkinkan orang melihat ada tawaran lain yang lebih substansial dari gerakan ini untuk menjawab misalnya bagaimana pengelolaan sumber daya alam pasca merdeka sehingga keinginan mensejahterakan masyarakat Riau terwujud ? Bagaimana idealnya hubungan antara negara-negara termasuk pemerintah lokal dengan masyarakat Riau ? Bagaimana mendudukan para pengusaha besar yang beroperasi di Riau dalam bingkai kepentingan masyarakat Riau ? dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak dijawab secara sistematis. Ideologi gerakan mestinya memandu motivasi yang beragam dari pelaku gerakan. Kesulitan besar yang dihadapi gerakan ini adalah membangun motivasi dan kesetiaan.

²³ Gurr (1993. 125-128) yang dikutip Mohtar Mas'ood et-al, *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PK UGM 2000), hal. 10-11.

Penutup

Gerakan sosial dikendalikan dan diikuti oleh: *Pertama*, orang yang betul-betul ingin melawan karena diperlakukan tidak adil oleh negara; *kedua*, orang yang bersemangat ingin merealisasikan idealisme membela kebenaran dan keadilan (membela kepentingan masyarakat; *ketiga*, orang yang ingin mendapatkan peran yang lebih untuk meraih prestise atau kedudukan; *keempat*, orang yang ingin mendapatkan imbalan, baik berupa uang, barang, atau bisa diterima dalam kelompok.

Pada umumnya gerakan sosial dikendalikan dan diikuti oleh orang-orang termasuk kategori ketiga dan keempat. Akan tetapi sebenarnya gerakan sosial yang mengusung ide besar, membutuhkan orang-orang yang mempunyai karakteristik kategori kedua dan pertama. Orang yang memiliki kategori tersebut tidak banyak di Riau.

Wallahu a'lam bi shawab.

Daftar Bacaan

Klandermans, Bert, 2002. "How Group Identification Help to Overcome the Dillema of Collective Action", *Journal American Behavioral Scientist*, Vol. 45 January .

_____, *Protes*, (terj), 2005. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Markoff, John, 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj), Pustaka Pelajar.

Mas'oed, Mohtar et-al., 200. *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta, P3PK UGM.

O'Donnel, Guillermo et-al., 1993. *Transisi Demokrasi : Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (terj), Jakarta, LP3ES.

Polleta, Francelia and Jasper, 1991. "Collective Identity and Social movememnts", dalam, *Journal Annual Skocpol*, Theda, *Negara dan Revolusi Sosial*, Erlangga, Jakarta.

Tilly, Charles, 1978. *From Mobilization to Revolution*, Reading Mass: Addison Wesley.

